

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kesejahteraan keluarga merupakan harapan dan tujuan dari semua orang, namun kenyataan di lapangan berbeda dengan harapan tersebut karena masih banyak keluarga belum sejahtera yang disebabkan oleh beberapa faktor dan di antaranya karena faktor ekonomi (pengelolaan keuangan keluarga). Menurut BKKBN (2011) keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

**Tabel 1.1**  
Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia dan Jawa Barat Tahun 2014-2017

No	Tahun	Indonesia (Dalam Juta Jiwa)		Jawa Barat (Dalam Juta Jiwa)	
		Maret	September	Maret	September
		1.	2014	28.2	27.7
2.	2015	28.5	28.5	4.43	4.48
3.	2016	28	27.7	4.22	4.16
4.	2017	27.7	26.5	4.16	3.77

*Sumber: BPS 2018.*

Berdasarkan data BPS masih banyak keluarga di Indonesia yang terkategori miskin/prasejahtera sebanyak 26.5 juta keluarga terkategori prasejahtera sampai tahun 2017. Di Jawa Barat sebanyak 3.77 juta keluarga yang terkategori miskin/prasejahtera. Melihat hal tersebut merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan tentunya masyarakat itu sendiri, demi tercapainya amanat UUD 1945 yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus (BAPPENAS, 2010).

Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi dengan masyarakat di lingkungannya. Berdasarkan aspek dan faktor tersebut kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah keluarga prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) (BAPPENAS, 2010).

Keluarga sejahtera dalam perspektif Islam biasa disebut dengan keluarga *sakinah*. Menurut Dirjen Bimas Islam (2011) keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Tujuan terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan baik fisik, sosial, ekonomi, psikologis atau mental, dan spiritual. Kesejahteraan keluarga akan tercapai dengan maksimal apabila kerjasama kemitraan antara suami dan isteri dalam keluarga tercipta dengan optimal (Puspitasari, Puspitawati, & Herawati, 2013)

Kesejahteraan dapat diraih apabila semua sumber daya keluarga dapat dikelola dengan baik. Sebagai upaya untuk keluar dari kondisi kemiskinan, keluarga akan mengubah strategi nafkah dengan menggunakan sumber-sumber nafkah yang mereka miliki yaitu modal alam, modal manusia, modal finansial, modal fisik dan modal sosial (Sugiharto, Hartoyo, & Muflikhati, 2016)

Menurut Dwi dalam (Widyatuti, 2012) teori-teori ekonomi sering mengaitkan antara tingginya tingkat kesejahteraan dengan kualitas hidup yang semakin tinggi pula. Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan semakin tinggi pula kesejahteraan yang dilihat dari besarnya konsumsi mereka. Melalui pemahaman tersebut teori kesejahteraan hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan saja, dimana dikatakan menurut: “Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya

beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.

Penelitian ini yang mengambil objeknya di muslimah pengajian masjid Daarut Tauhid. Hal tersebut dikarenakan dari hasil pengujian penulis menemukan hasil bahwa kesejahteraan keluarga muslimah pengajian masjid Daarut Tauhid terkategori keluarga sejahtera. Penulis ingin meneliti apakah ada keterkaitan antara efek religiusitas terhadap implementasi *sakinah finance* yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.

**Tabel 1. 2**  
Kategori Responden Variabel Kesejahteraan Keluarga

Skala	Rentang	Kategori
$X > (\mu + 1,0\sigma)$	$X > 1620$	Sejahtera
$(\mu - 1,0\sigma) \leq X \leq (\mu + 1,0\sigma)$	$1620 \leq X \leq 360$	Cukup Sejahtera
$X < (\mu - 1,0\sigma)$	$X < 360$	Tidak Sejahtera

Sumber: *Lampiran*

Berdasarkan tabel 1.2 kategori, maka kesejahteraan keluarga yang menjadi responden dikategorikan sejahtera karena jumlah skor variabel ini secara keseluruhan adalah sebesar 2275. Hal ini tentunya membuktikan bahwa keluarga muslimah pengajian Daarut Tauhid adalah sejahtera.

Selain menentukan kategori variabel kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, dapat dilihat pula kategori variabel per responden (muslimah pengajian Daarut Tauhid). Berikut merupakan hasil perhitungan kategori per responden berdasarkan jawaban responden:

**Tabel 1. 3**  
Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Kesejahteraan Keluarga

Skala	Rentang	Kategori	F	R
$X > (\mu + 1,0\sigma)$	$X > 33$	Sejahtera	49	81,6%
$(\mu - 1,0\sigma) \leq X \leq (\mu + 1,0\sigma)$	$21 \leq X \leq 33$	Cukup Sejahtera	11	18,3%
$X < (\mu - 1,0\sigma)$	$X < 21$	Tidak Sejahtera	0	0%

Sumber: *Lampiran*

Berdasarkan hasil pengkategorian pada dari tabel 1.3, dapat dilihat bahwa muslimah pengajian Daarut Tauhid yang mempunyai keluarga sejahtera sebanyak 49 orang dan yang mempunyai keluarga cukup sejahtera sebanyak 11 orang.

Menurut Muhammadiyah Amin (2018) di tahun 2017 lalu angka perceraian masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum ada. Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, tapi kalau data tahun 2016 sebesar 350 ribuan. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya memang terus meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik tiga persen per tahunnya. Data perceraian tahun 2016-2018 belum tercatat secara administrasi, data perceraian terbaru dari Badan Pusat Statistik Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
Jumlah Perceraian Di Indonesia dan Jawa Barat Tahun 2012-2015

No.	Tahun	Perceraian (Dalam Ribu Perkara)	
		Indonesia	Jawa Barat
1.	2012	346	63
2.	2013	324	60
3.	2014	344	66
4.	2015	347	70

*Sumber: BPS 2016 data diolah.*

Menurut Anwar Saadi (2017) Apabila sebagai sampel kita mengambil data dua tahun 2012 dan 2013 saja. Jika diambil tengahnya, angka perceraian di dua tahun itu sekitar 350.000 kasus. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam. Di Indonesia terjadi 40 kasus perceraian setiap jamnya. Hampir seribu kasus perceraian setiap harinya.

Ada dua penyebab utama ketidakharmonisan, yakni kekurangan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, misalnya berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Sudibyo Alimoeso mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang umumnya melatarbelakangi

perceraian, yakni faktor ekonomi, psikologi, dan ketiadaan ruang pengaduan masalah keluarga. Faktor ekonomi terkait erat dengan kesiapan dan pemahaman calon pengantin untuk mengelola keuangan keluarga. Sementara faktor psikologi berhubungan dengan kematangan atau kesiapan mental calon pengantin mengarungi rumah tangga (Muharam, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting membahas pengelolaan harta khususnya dalam keluarga.

Pertengkaran dalam rumah tangga terkadang berlatar belakang masalah keuangan keluarga. Umumnya, banyak yang menganggap masalah keuangan keluarga muncul karena kecilnya pendapatan. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, penyebab masalah keuangan keluarga yaitu karena lemahnya manajemen keuangan rumah tangga. Hasil penelitian sebuah media di Jakarta menunjukkan bahwa para eksekutif muda yang bergaji diatas Rp. 15 juta per bulan, terancam miskin pada masa depannya karena hidup berfoya-foya dan tidak memiliki investasi. Disisi lain, banyak keluarga miskin yang mampu mengantarkan anaknya ke jenjang pendidikan sarjana karena keluarga miskin tersebut mampu mengelola keuangan mereka meskipun sangat minim (Saktiawan, 2009).

Menurut Hakim, Sunarti & Herawati (2014) manajemen keuangan keluarga adalah mengelola atau mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dalam penelitiannya Hakim, Sunarti & Herawati menemukan bahwa para istri, baik yang bekerja pada sektor formal maupun informal, belum mempunyai perencanaan keuangan yang baik, pengalokasian pengeluaran masih sangat jarang dilakukan, dalam dimensi perencanaan dan pengorganisasian istri sudah mencoba untuk menabung meskipun terkadang tabungan tersebut digunakan untuk membayar tanggungan bulanan yang tidak bisa dibayar dari pendapatan yang diperoleh.

Perencanaan keuangan dianggap tidak perlu dilakukan dengan asumsi setiap bulan pengeluaran sama atau pendapatan yang diterima tidak menentu (Hakim, Sunarti, & Herawati, 2014). Kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan masalah keuangan membuat beberapa keluarga tidak mengikuti praktik-praktik keuangan yang telah dianjurkan (Hogart & Hilgert, 2003). Sebagian besar keluarga tidak melakukan pencatatan keuangan. Hal ini mengindikasikan perencanaan keuangan yang tidak komprehensif namun

berdasarkan kebutuhan sesaat atau insidental (Joko, 2012). Pentingnya keuangan keluarga adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga itu sendiri demi tercapai cita-cita keluarga secara finansial (Febriani & Saharuddin, 2014).

Dengan demikian, meski rendahnya pendapatan adalah masalah, secara jangka panjang pendapatannya bisa menjadi tinggi bila dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, meskipun berpendapatan tinggi, jika tidak dikelola dengan baik, ujung-ujungnya akan berada dalam kondisi yang kekurangan (Saktiawan, 2009).

Menurut Pangeran (2013) hasil dari penelitiannya mengungkapkan bahwa modal ekonomi dan pendidikan berperan sebagai faktor utama dalam mempengaruhi perilaku individu dan sikap terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Penelitian tersebut sama dengan penelitian Hakim, Sunarti, & Herawati (2014) bahwa manajemen keuangan dan pendidikan istri berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan keuangan istri. Pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu diberikan kepada keluarga dengan pendapatan dan pendidikan rendah untuk mencapai kepuasan keuangan. Hasil penelitian Masdar & Zaiful (2011) menemukan bahwa belum adanya pengelolaan ekonomi rumah tangga, hal ini ditandai dengan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, atau keluarga berhutang kepada pihak luar untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Hasil penelitian Tsania, Sunarti, & Krisnatuti (2015) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan menikah istri masih relatif rendah khususnya kesiapan finansial dan kesiapan intelektual. Sebagian besar istri belum mempersiapkan diri dalam hal finansial seperti menabung, memiliki perhiasan atau investasi lainnya dan mencari ilmu terkait pengelolaan uang sebelum menikah. Padahal, kesiapan finansial menjadi indikator penting kesuksesan pernikahan. Pengelolaan keuangan keluarga menjadi dasar dalam melakukan manajemen keuangan, tetapi hanya sedikit keluarga yang mengelola keuangan rumah tangganya dengan baik dan benar.

Perencanaan keuangan penting dilakukan terutama dalam menghadapi kebutuhan dan keinginan yang tidak pasti. Pengalokasian dana dan perencanaan baik secara lisan, tulisan, ataupun ide baiknya dilakukan sebelum melakukan pembelian agar keuangan keluarga dapat teratur dengan baik tanpa ada kerugian

finansial baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun dalam jangka panjang (Finira & Yuliati, 2013).

Dalam penelitian Raharjo, Puspitawati, & Krisnatuti (2015) ditemukan bahwa semakin baik manajemen keuangan yang dilakukan maka semakin tinggi kesejahteraan keluarga. Penelitian dari Rizkillah, Sunarti, & Herawati (2015) menemukan bahwa dimensi kepuasan perkawinan, aspek dengan capaian tertinggi adalah ekonomi dan terendah yaitu cinta dan hubungan intim. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sulastri & Hartoyo (2014) menemukan bahwa kesejahteraan subjektif secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, dukungan sosial, dan strategi nafkah. Pendapatan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan subjektif.

Di era modern ini kita telah kehilangan panutan dalam berkeluarga khususnya dalam mengelola keuangan keluarga yang sesuai syariat Islam untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Proses merencanakan dan mengelola keuangan menurut aturan Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah untuk mencapai tujuan keuangan, baik untuk kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat (Putra, 2016). Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting, maka Allah Swt. dan Rasulullah Saw. mengajarkan pengelolaan keuangan seperti dalil pada al-Qur'an dan Hadits berikut.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”* (Q.S. An-Nisa (4) : 9).

*“Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang empat perkara (1) tentang umurnya untuk apa ia habiskan, (2) tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, (3) tentang hartanya darimana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan (4) tentang badannya untuk apa ia gunakan”* (HR. At-Tirmidzi).

Dalil Q.S. an-Nisa (4): 9 dan hadits riwayat at-Tirmidzi memberi pesan kepada kita bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk hidup berkecukupan. Hidup berkecukupan bukan hanya melimpahnya harta tetapi bisa memberikan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya baik secara materil maupun spiritual. Islam juga mendorong kita untuk mencari nafkah dengan jalan yang Allah ridhai

dan membelanjakannya di jalan yang Allah ridhai pula. Untuk mencari nafkah dan membelanjakan hasilnya tentu membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik demi tercapainya keberkahan dalam hidup berumah tangga.

Dalam konteks Islam, pengelolaan harta/keuangan yang dilakukan harus dalam koridor pemenuhan kemaslahatan. Sikap ini melahirkan suatu *stereotype* bahwa dalam Islam membuat perencanaan keuangan keluarga harus bertujuan untuk mencapai *falah* (sejahtera dunia dan akhirat), menghindari cara yang *maysir*, *gharar*, *riba* dan *zalim* baik dalam mengumpulkan pendapatan maupun dalam membelanjakannya, mengutamakan *sadaqah* meskipun rezeki sedang sempit dan menjauhi sifat boros (Syaparuddin, 2014).

Menurut Umam (2013) dalam rumusan Abu Sin, ada empat hal yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan manajemen Islami. (a). Manajemen Islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak Islami. (b). Kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar. (c). Faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. (d). Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. Semua dasar dan tujuan manajemen harus terintegrasi, konsisten, dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen, setiap usaha harus didahului oleh proses perencanaan yang baik.

Menurut Muhammad (2014) manajemen keuangan syariah yaitu, manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan. Manajemen harta dalam Islam, yaitu pemanfaatan harta yang bertujuan untuk kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya, selain itu pemanfaatan untuk amal shaleh sebagai alat untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt. Menurut Ahmed & Salleh (2016) *Islamic Financial Planning* adalah perencanaan keuangan untuk mengatur keuangan pribadi atau keluarga dengan memperhatikan aspek filantropi (zakat, infaq, shadaqah dan waqaf) dan bertujuan untuk kemaslahatan sesuai dengan *maqashid syariah*.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli, manajemen keuangan Islam khususnya dalam keluarga yaitu, manajemen keuangan Islam dalam keluarga adalah cara mengelola keuangan sesuai dengan bingkai syariah Islam untuk

mencapai masalah (*maqashid syariah*) dan mengedepankan aspek filantropi (zakat, infaq, shadaqah dan waqaf).

Dalam Islam, target hidup manusia di dunia adalah tercapainya falah. Falah berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Falah akan dapat terwujud apabila kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan dasar manusia disebut masalah. Mengutip pendapat as-Syatibi, Misanam mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari agama (*ad-din*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nash*) dan harta (*maal*). Penjelasan as-Syatibi ini menurut Misanam menggarisbawahi bahwa uang (*maal*) adalah salah satu komponen yang harus dipenuhi agar kondisi masalah tercapai (Syaparuddin, 2014).

Dari sini terdapat benang merah antara harta (uang) yang harus dikelola dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Jadi dalam konteks islam, pengelolaan harta/keuangan yang dilakukan harus dalam koridor yaitu dalam rangka pemenuhan kemaslahatan. Dengan demikian sikap kita dalam menggunakan uang harus berpatokan kepada kemaslahatan, yakni orientasi uang yang digunakan untuk memproteksi agama, jiwa, keturunan, ilmu pengetahuan dan harta benda yang dimiliki (Syaparuddin, 2014).

Jika demikian adanya, maka hal ini menjadi sangat *urgen* untuk dibahas dalam penelitian ini karena dapat memberikan solusi alternatif dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mewujudkan sebuah keluarga *sakinah*, sehingga keretakan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian akibat persoalan keuangan dapat dihindari. Dari permasalahan latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti masalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga dengan judul **“Efek Religiusitas terhadap Implementasi *Sakinah Finance* dan Dampaknya pada Kesejahteraan Keluarga”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa penyebab kemiskinan apabila dilihat dari teori yaitu, sebab kultural (bodoh, malas, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi dan fatalistik) yang dilatar belakangi oleh teori kapitalisme dan sebab struktural yang dilatar belakangi oleh teori marxisme (Huda, 2015). Masalah kesejahteraan keluarga dan penyebab utama perceraian di antaranya belum tepatnya cara mengelola keuangan keluarga, khususnya pengelolaan keluarga berbasis syariah untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Berikut identifikasi masalah dari penelitian ini:

1. Kemiskinan di Indonesia terbilang fluktuatif sampai akhir tahun 2017, artinya masih banyak penduduk Indonesia yang tergolong miskin, meskipun diukur dengan garis kemiskinan yang tergolong cukup rendah yaitu dengan penghasilan Rp. 300.000,00 setiap bulannya (BPS, 2017).
2. Pertengkaran dalam rumah tangga terkadang berlatar belakang masalah keuangan keluarga. Umumnya, banyak yang menganggap masalah keuangan keluarga muncul karena kecilnya pendapatan. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, penyebab masalah keuangan keluarga yaitu karena lemahnya manajemen keuangan rumah tangga (Saktiawan, 2009).
3. Masalah utama dari perceraian adalah masalah ekonomi (Muharam, 2015).
4. Kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan masalah keuangan membuat beberapa keluarga tidak mengikuti praktik-praktik keuangan yang telah dianjurkan (Hogart & Hilgert, 2003).

## 1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai fokus dalam pembuatan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan menempatkan penelitian ini secara tepat.

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga pada komunitas muslimah majelis ta'lim Daarut Tauhid ?
2. Bagaimana implementasi *sakinah finance* dan religiusitas pada komunitas muslimah majelis ta'lim Daarut Tauhid ?

3. Bagaimana implementasi *sakinah finance* dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga pada komunitas muslimah majelis ta'lim Daarut Tauhid ?
4. Bagaimana pengaruh efek moderasi religiusitas terhadap implementasi *sakinah finance* dan dampaknya pada kesejahteraan keluarga ?

#### **1.4. Tujuan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empirik tingkat kesejahteraan, implementasi *sakinah finance* dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, efek religiusitas berpengaruh pada *sakinah finance*, pengaruh efek moderasi religiusitas terhadap implementasi *sakinah finance* dan dampaknya pada kesejahteraan keluarga.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari pembahasan ini adalah manfaat atau signifikansi dari teori dan praktik. Manfaat dari segi teori yakni melengkapi hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh efek moderasi religiusitas terhadap implementasi *sakinah finance* dan dampaknya pada kesejahteraan keluarga yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Manfaat dari segi praktik yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang implementasi ekonomi Islam yang sesuai dengan aturan serta landasan syariat Islam dalam keluarga.